

Otoritas Ilmuan Sosial Politik, Dalam Dinamika Politik

Muh. Kausar Bailusy
Guru Besar Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Pemahaman Dasar Teoritis

Perlu dimaknai dunia kemahasiswaan adalah embrio ilmuan dalam berbagai bidang keilmuan. Bidang yang sedang ditekuni pada saat ini yakni ilmu social dan ilmu politik, sebagai objek mahasiswa sospol yang bergayuh dan terus bergayuh untuk mencapai gelar ilmu social dan ilmu politik. Kondisi formal konstitusional mengakui pemilikan ilmu oleh mahasiswa menjadi sarjana atau disebut ilmuan social politik dan spontan memiliki otoritas ilmuan social politik.

Kajian otoritas ilmuan politik yang sedang berinteraksi dalam system politik yang penuh dengan dinamika politik. Pemilihan umum memiliki proses yang rumit dan frekwensi interaksi politik yang cukup tinggi. Oleh karena itu interaksi politik dapat dikatakan sebagai salah satu tanda atau symbol dari dinamika politik. Dalam dinamika politik menggambarkan proses interaksi politik antara supra struktur politik atau lembaga tempat bersemayam para politisi dan penguasa. Infrastruktur politik merupakan ruang politik warga Negara untuk berinteraksi dengan penguasa yang mempunyai kekuasaan politik, sedangkan warga Negara memiliki kedaulatan politik disebut sebagai mahluk politik.

Plato telah memposisikan manusia sebagai mahluk politik (Republik; 2002). Teori politik ini kemudian dikembangkan dilingkungan akademik oleh para akademisi yang konseren dan berkehendak memahami politik sebagai ilmu yang perlu dikembangkan. Pada tahapan ini ilmuan politik perlu memiliki pemahaman secara akademik atau teori

politik dan memiliki pemahaman operasional atau partisipasi politik. Disamping itu dibutuhkan kapabilitas ilmuan politik yang tahu dan faham perkembangan ilmu politik yang dirancang dan telah disepakati dan diakui dalam dunia akademik ilmu politik dalam tatanan internasional. Organisasi internasional UNESCO, tahun 1948 berkontribusi perkembangan ilmu politik dengan menetapkan ruang lingkup ilmu politik dalam 4 bidang induk sebagai berikut;

- Teori-teori politik.
- Lembaga-lembaga politik.
- Partai-partai, Golongan-golongan dan Pendapat Umum.
- Hubungan Internasional. [Rodee, Anderson, & Cristol 1967—5- 6]

Perkembangan ilmu politik jika ditinjau secara luas maka ilmu politik sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek Negara dan kehidupan politik. Perkembangan ini jika disimak pemikiran dan penulisan tentang ilmu politik oleh berbagai ilmuan politik antara lain HEYWOOD ANDREW dalam bukunya POLITICS, mengatakan aspek Negara dan kehidupan politik meliputi;

- Politics as the art of government.
- Politics as public affairs.
- Politics as compromise and consensus. Politics as power and the distribution of resources. [Heywood; 2002 - 5].

Etridge.ME & Handelman.H. dalam bukunya POLITICS IN ACHANGING WORLD.... [1994 -6] bahwa ilmu politik mencakup;

- Politics is the science of who gets what, when and how.
- Politics is the authoritative allocation of values.
- Politics is the activity by which differing interest within a given unit of rule.....
- Politics is the processes by which human efforts towards attaining social goals are steered and coordinate.

Pemikiran dan pemahaman ilmuan politik yang mencakup berbagai aspek Negara dan kehidupan politik seperti ini secara metodologi menempatkan ilmu politik pada posisi yang dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya (Miriam Budiardjo 1980-5). Para ilmuan politik menyepakati dan menyebut ilmu politik sebagai ilmu sosial yang tertua di dunia.

Ilmu politik secara empirik diketahui sebagian besar akademisi yang berkecimpung dalam ilmu sosial dan pada tahapan partisipasi politik atau implementasi teori politik hampir semua akademisi ilmu-ilmu non sosial juga memiliki kemampuan berpikir politik, berpendapat politik berargumen politik, tapi kurang memiliki pemahaman dasar ilmu politik dan metodologi ilmu politik. Asumsi penulis ini didasarkan pada fenomena politik yang berkembang secara pesat dalam proses reformasi politik, antara lain pemilihan umum kepala daerah, pemilihan umum anggota legislative dan berkesinambungan dengan pemilihan umum Presiden-wakil Presiden yang sedang berproses.

Ilmuan sosial dan ilmuan politik pada tahap mengarungi dunia empirik dan dunia partisipasi politik yang berkembang pesat, mereka mengalami kendala psikologis dalam implementasi politik. Sebagian ilmuan politik kurang mampu mengembangkan ilmu politik yang pernah diraih pada pendidikan strata satu strata pendidikan magister of arts dan Doctor atau program S3. Tingkat keberhasilan dalam mencapai gelar magister ilmu politik dan doctor ilmu politik sangat pesat. Sehingga waktu yang tidak begitu lama ilmuan politik dengan gelar magister dan doctor di Indonesia menjadi semarak dan dapat dikatakan cukup signifikan. Namun dikalangan sebagian ilmuan politik kurang memiliki kapabilitas daya saing politik, kurang mampu menerapkan teori

politik yang diperoleh pada saat kuliah dengan fenomena politik yang sedang dihadapi. Dalam pergulatan dunia empirik partisipasi politik ilmuan politik diharapkan menguasai bidang keilmuan secara komprehensif untuk bangkit dan berkewajiban mengembangkan tafsir politik atau mengemukakan konfigurasi politik dalam dunia empirik.

Tafsir politik para ilmuan terbangun oleh proses lingkaran dialogis secara interogatif dalam dunia internal ilmuan sosial politik. Pada tatanan ini faktor pengalaman dan pemahaman perkembangan sejarah politik sangat mengkonstruksi proses tafsir politik setiap ilmuan politik. Menurut Ricouer; menafsir merupakan masalah "Creative Imagination of the possible"[Tafsir politik; Geertz- xix].

. Pada tatanan akademik, ilmuan politik, elite politik, aktor politik dalam melakukan penafsiran politik harus memiliki kemampuan imajinasi untuk melihat hal-hal yang tersirat dari yang tersurat tentang aneka ragam fenomena politik, partisipasi politik dan kepentingan politik. Ilmuan politik yang memiliki kemampuan, elite politik yang rasional, aktor politik yang rasional, kemungkinan mampu menangkap fenomena politik dalam dunia makna perpolitikan kemudian berupaya memahami realitas politik dan kepentingan politik warga Negara sebagai partisipan politik. Tindakan perpolitikan yang dilakukan oleh ilmuan politik, elite politik, dan aktor politik seperti disebut terdahulu merupakan tindakan politik seorang negarawan.

Perspektif politik dinegara maju dominant mengunggulkan konfigurasi teori politik dan diperjelas dengan politik partisipasi atau pragmatisme politik. Tingkat kelurusan dan kejujuran ilmuan politik dan partisipasi politik selalu menjaga keseimbangan teori politik dengan partisipasi politik atau pragmatisme politik. Pada tingkat transfigurasi teori politik oleh ilmuan politik diupayakan meminimalisir tingkat penyimpangan partisipasi politik sampai pada taraf penyimpangan yang semakin kecil menjadi semakin kecil dan bukan tidak ada penyimpangan partisipasi politik atau pragmatisme politik.

Para ilmuan politik yang memiliki otoritas politik berkewajiban moral untuk membangun cara berpikir politisi sebagai partisipan politik. Dinegara maju partisipan politik atau kaum pragmatisme politik dibina dan dibimbing oleh Partai Politik dalam sistem manajemen partai politik yang rasional untuk memberi otoritas politik kepada politisi. Oleh karena itu pemimpin partai politik harus berupaya memanfaatkan ilmuan politik yang telah memiliki otoritas politik untuk membangun sumberdaya partai politik dengan menata cara berpikir politik para calon politisi dan partisipan politik. Para filosof berpendapat bahwa manusia bukan hanya ada, tetapi mengerti adanya, karena itu dalam perbuatannya, dialah yang menggerakkan dirinya sendiri (Driya Kara 2006). Secara filosofi para politisi wajib berpikir. Berpikir adalah tindakan yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan fenomena politik dan membuat keputusan politik [UU, PERDA, KEPRES INPRES BANPRES] yang dominant mengkontribusi kepentingan orang banyak atau public.

Posisi manusia yang memiliki otoritas akademik, atau otoritas ilmuan politik berkewajiban moral memiliki akal budi, mengetahui kepentingan masyarakat, memahami kepentingan masyarakat, sehingga memposisikan seorang akademisi, atau ilmuan politik yang mampu memahami dirinya. Fenomena teori politik seperti ini perlu dibangun dikalangan politisi dan pragmatisme politik sebagai bekal politik dalam bertindak dan berbuat untuk kepentingan rakyat. Landasannya, berpikir rasional dalam berpolitik, tanpa berpikir rasional para politisi cenderung menjadi hewan predator, atau pemangsa suara rakyat yang telah terjadi pada pemilu kepala daerah dan pemilu anggota legislatif yang baru berakhir, dengan ditetapkan anggota legislatif terpilih pada tingkat lokal dan tingkat nasional. Pada PILPRES yang akan datang politisi yang berperilaku predator suara rakyat semoga makin berkurang.

Ilmuan Politik , Aktor Politik Dalam Arena Sistem Politik

Perpolitikan dalam system politik demokrasi, system politik otoriter, ulah para elit politik, aktor politik selalu merepotkan para ilmuan politik dalam mencerna system politik yang sedang berlangsung. Ulah para elit politik, aktor politik terhadap aturan system politik terutama yang berhubungan dengan partisipan dan pragmatisme politik. System politik demokrasi telah menata alur cara berpikir politik atas dasar otoritas politik yang terbangun dalam struktur system politik. Setiap struktur politik pasti mempunyai fungsi politik. Robbert K.Merton berpendapat bahwa; fungsi adalah akibat yang tampak, yang ditujukan bagi kepentingan adaptasi dan penyetelan (adjustment) dari suatu system tertentu dan dys-function adalah akibat-akibat yang tampak, yang mengurangi daya adaptasi dan penyetelan (ajusment) dari suatu system (S.P.Varma 1987-69). Gabriel Almond yang berkonsentrasi bidang perbandingan politik berpendapat bahwa fungsi politik selalu berada dalam struktur politik (SP.Varma 1987-97). Pandangan para ahli ini oleh elit politik ,aktor politik kemungkinan belum mengetahuinya atau belum pernah dibaca, oleh sebab itu dalam partisipasi politik sebagai pragmatisme politik selalu membangun masalah politik. Perlu dipahami pada tatanan tertentu para ilmuan politik harus memiliki kecenderungan pragmatisme politik yang tinggi dalam membangun penyelesaian masalah politik.

Tingkat kecenderungan ilmuan politik dalam memahami fenomena politik selalu menggunakan pendekatan system. Salah satu bagian dari system yang bersifat dinamik yaitu fungsi politik dari struktur politik. Hal ini memperlihatkan tingkat konsistensi dari ilmuan politik dalam memahami dinamika politik yang dinamis dan kontraproduksi dalam menafsir system politik, Kondisi Indonesia menunjukkan hanya sebagian kecil ilmuan politik yang memiliki cara berfikir yang konsisten pada pendekatan system politik. Ricoeur berpendapat bahwa menafsir adalah soal creative imagination of the possible, semua imajinasi yang mampu melihat yang tersirat dibalik yang tersurat, dan mampu menangkap dunia makna (T.Gibbons XIX – 2002). Dalam sistem politik , dunia makna beda dalam struktur politik yang memiliki fungsi politik. Fungsi politik ini oleh ilmuan politik perlu dikritisi dan bersikap kritis terhadap setiap fungsi politik yang dinamik dalam masyarakat. Dalam sistem politik demokrasi penafsiran ilmuan politik yang bernilai apabila penafsiran itu selalu mengandung kebutuhan masyarakat. Crossan & Taylor (Gibbons.T;xix-xx—2002), berpendapat bahwa penafsiran yang bernilai sering justru bersifat dekonstruktif, yang kuasa membongkar topeng-topeng gagasan manusia dan membuat manusia penasaran dan berjuang terus mencari dunia makna dalam sistem perpolitikan demokrasi dan sistem perpolitikan otoriter.

Dunia makna bagi ilmuan politik digunakan untuk menafsir dinamika politik dalam system politik. Hakekat menafsir harus bersikap kritis setiap saat terhadap mekanisme system politik. Namun perlu disadari bahwa aktor politik dalam system politik selalu melakukan kegiatan politik untuk memperoleh nilai-nilai politik. Tafsir politik merupakan proses lingkaran dialogis interogatif (Hermeneutic circle). Sasaran menafsir yaitu subject matternya yakni kebenaran tentang kehidupan politik para aktor dalam system politik (Gibbons.T XIX – 2002).

Para ilmuan politik dalam tatanan system politik berupaya untuk menjaga kebenaran politik antara fungsi dan struktur. Namun mekanisme sistem politik yang sudah menjadi format politik selalu ditafsir oleh para elit politik dan aktor politik secara berbeda dan menurut kepentingan elit politik dan aktor politik. Dalam system politik demokrasi, para elit politik, aktor politik dapat dikategorikan secara parsial, yakni aktor politik individual, aktor politik kelompok atau aktor politik organisasi Negara. Teori politik secara aktual mengaktegorikan aktor politik dalam tiga kategori. Menurut Marian D.Irish & Elke Frank, aktor politik yaitu Gladiator, Transisional, dan Spektator (Ala Andre; 92- 1985), dengan menghuni tingkat kekuasaan dan kesalahan dalam

melakukan analisis politik, dan terutama dalam hal transfigurasi politik.

Transfigurasi aktor politik terhadap proses sistem politik selalu didasarkan pemilikan diri atas ilmu politik atau kemampuan memahami teori politik dalam sistem politik. Tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas politik atau kegiatan politik, baik kegiatan politik legal-lunak, maupun kegiatan politik illegal-keras selalu didasarkan tingkat transfigurasi politik yang ditafsir oleh aktor politik terhadap sistem politik (Robert Dahl : 83-1985). Individu – individu dalam sistem politik tentunya memperhatikan sistem politik dan kehidupan politik. Beberapa orang acuh pada politik ada individu yang aktif memperhatikan sistem politik, bahkan ada beberapa orang yang sangat aktif dalam mengamati kehidupan politik. Pada sisi lain ada beberapa orang berusaha mencari kekuasaan secara aktif. Diantara para pencari kekuasaan ini ada yang memperoleh kekuasaan lebih banyak dari pada individual lain. Para calon anggota legislatif lokal dan calon anggota legislatif nasional sebagai pencari kekuasaan (pemilu legislatif 2009). Diantara para aktor ini sebagian besar sangat kurang memahami kekuasaan yang dicari dalam tatanan sistem politik. Transfigurasi politik elit partai politik membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif. Transfigurasi elit partai politik memiliki keutamaan citra politik predator terhadap CALEG yang wajib membayar ke Partai politik. Partai politik peserta PEMILU legislatif dominan memiliki citra politik predator, dan berupaya melupakan citra politik demokrasi yang bermoral dan etis yang sudah tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. CALEG tidak dimenej secara profesional oleh mesin partai politik yang diharuskan oleh AD&ART.

Transfigurasi politik yang terbangun dalam elit partai yang oligarkhis berorientasi pada pendapatan (uang pendaftaran CALEG.). Sedangkan transfigurasi politik yang terbangun dalam diri CALEG (aktor politik baru), yakni yang terpenting terdaftar oleh partai politik sebagai CALEG untuk bertarung dalam pemilu legislatif dan mendapat kursi kekuasaan. Kondisi manajemen partai politik seperti ini, muncul keraguan terhadap CALEG terpilih yang dicalonkan oleh partai politik, dan jika mereka terpilih mampukah mereka mengoperasionalkan fungsi lembaga legislatif daerah. Secara nasional CALEG yang telah dicalonkan oleh partai politik disetiap daerah untuk merebut kursi disetiap Legislatif daerah, perbandingannya satu kursi harus direbut oleh pencari kekuasaan CALEG dengan sebaran 24 – 28 CALEG BARU. (KPUD-PILEG 2009). Fenomena politik calon anggota legislatif hanya berusaha untuk dicalonkan oleh partai politik menjadi calon anggota legislatif, peluang untuk terpilih dan tidak terpilih kurang dipikirkan. Menurut teori politik yakni sistem perwakilan politik, partai politik berkewajiban dan penanggung jawab terhadap sistem politik demokrasi. Pada PEMILU Presiden bulan juli yang akan datang partai politik perlu membangun transfigurasi politik yang memiliki moral politik dan etika politik. Kondisi ini perlu dibangun agar elit politik partai politik dan aktor politik yang menjadi tim sukses memiliki moral politik dan etika politik dalam proses mensukseskan calon presiden calon wakil presiden yang dipromosikan.

Para aktor politik yang kurang basis pengetahuan politik kebanyakan mereka tergelincir dalam arena transfigurasi politik. Namun sebagai aktor politik yang merasa memiliki otoritas politik sebagai aktor politik yang dilahirkan oleh lembaga politik, atau partai politik selalu percaya diri, walaupun banyak melakukan penyimpangan tafsir politik dalam partisipasi politik. Konfigurasi politik yang dikemukakan dalam menafsir politik terhadap dinamika sistem politik selalu dianggap benar. Kondisi dan wacana politik seperti PEMILU Kepala Desa, PEMILU Kepala Daerah, PEMILU Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD dan PEMILU Presiden dan Wakil Presiden bulan Juli 2009 yang akan datang.

Aktor politik yang kalah dalam mencari kekuasaan membuat tafsir politik terhadap mekanisme PEMILU dinyatakan tidak fair atau pelaksana PEMILU yakni KPU dan KPUD curang. Transfigurasi politik aktor politik baru seperti ini, jika dinilai secara akademik dan

landasan konstitusional PEMILU, maka dapat dikatakan aktor politik masih sangat minim memiliki pemahaman teori politik tentang sistem politik sehingga menghasilkan dasar alasannya yang sangat lemah. Aktor politik pencari kekuasaan secara psikologi menginterpretasi diri sebagai aktor politik yang merasa dan menganggap memiliki kemampuan politik secara akademik untuk memperoleh kekuasaan yang dicari. Pada sisi lain aktor politik mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa dia dapat memenangkan pertarungan kekuasaan, menentukan kekuasaan dan nilai-nilai politik dan symbol-simbol politik bagi dirinya. Para aktor politik secara individual mengandalkan cara berpikir politik menurut interpretasinya, sedangkan basis ilmu politik dan teori politik yang difahami masih kurang. Oleh sebab itu setiap kebijaksanaan atau aturan main dalam partisipasi politik selalu menjadi arena transfigurasi politik menurut asumsi aktor politik.

Tingkat arogansi politik yang dilakukan aktor politik dominant didasarkan pada posisi, dan bukan pemilikan pengetahuan politik dan ilmu politik. Menurut Dahrendorf metode posisi merupakan unsur kunci, setiap posisi pasti memiliki otoritas, karena otoritas selalu melekat pada posisi. (Ritzer & Goddman; 2003 -155). Welsh mengatakan bahwa pemimpin pemerintahan adalah aktor-aktor politik otoritatif. Aspek otoritas adalah salah satu karakteristik penting dari kepemimpinan. (Ala Andre; 1985; 55). Aktor politik dalam berbagai kajian ilmu politik selalu dipisahkan dengan istilah elit politik. Robert Dahl, Ithel Pool, Charles R Nixon, Dwaine Mervick, Alfred de Grazia menggunakan istilah Aktor politik. Elit politik adalah mereka yang menduduki posisi atau jabatan strategis dalam system pembuatan keputusan dalam organisasi politik dan organisasi Negara. Para ahli politik yang menggunakan istilah elit politik antara lain,; Aristoteles, Karl W Deutch, Davis F Roth, Frank L Wilson, Suzanna Keller,. Elite politik berkewajiban menguasai lalulintas arus pesan politik dan aliran komunikasi politik. Dalam system politik Indonesia secara empirik praktisi dan pimpinan partai politik menggunakan kedua istilah secara bergantian menurut keenakan dalam berpidato. Bagi pimpinan partai sampai para menteri, Presiden dan wakil presiden, Gubernur, Bupati dan para anggota dewan sangat rendah memiliki alat kontrol dalam menempatkan istilah elit politik dan aktor politik. Fenomena tersebut merupakan kesalahan tradisional dalam berbentuk kesalahan berjamaaak.

Dalam mengendalikan sistem politik terdapat sejumlah 1000 sampai 1500 elit politik nasional yang memiliki otoritas politik nasional yang setiap hari membuat keputusan bagi dua ratus jutaan rakyat Indonesia. Pemerintahan lokal Sulawesi Selatan dalam system politik lokal memiliki 100 sampai 150 elite politik lokal yang memiliki otoritas politik yang setiap saat dapat membuat keputusan politik lokal sebagai perwujudan desentralisasi – era otonomi yang dominant berupaya melayani kepentingan delapan juta sampai 9 juta penduduk Sulawesi Selatan.

Dalam arena transfigurasi politik PEMILU kepala daerah, para elite politik yang menempati posisi pengambilan keputusan politik sering berulah tanpa dasar alasan yang konstitusional menolak keputusan politik yang sudah ditetapkan oleh KPUD. Fenomena KPUD dalam perpolitikan lokal menempati posisi yang amat rawan. Jastifikasi KPUD untuk pembenahan keputusan atau menetapkan keputusan masih lemah. Para elite politik memiliki posisi politik, dan sangat rendah pengetahuan bidang politik. Elite politik seperti ini sangat sulit dikategorikan sebagai elit politik. Pemahaman elite politik oleh Ithel Pool dan kawan-kawan berupaya untuk mengkategorikan actor politik/aktivis politik yang dibedakan dengan elit politik dengan enam criteria sebagai berikut:

1. Sudah menjadi anggota satu organisasi politik
2. Memberi uang pada satu organisasi politik atau calon
3. Sering menghadiri rapat-rapat politik
4. Ikut ambil bagian dalam kampanye
5. Menulis surat mengenai topik-topik politik kepada legislator, pejabat politik atau pers

6. Membicarakan masalah politik dengan orang lain

Para elit politik ini menyebar pada organisasi politik tingkat nasional dan lokal. System politik Indonesia yang menerapkan system PEMILU kepala daerah oleh pemilih membuat aktivitas politik para elite politik menjadi dinamis tanpa kendali. Setiap PEMILU kepala daerah mulai dari penetapan daftar pemilih, hari pemilih, perhitungan hasil pencoblosan dan pencontrengan dan penetapan hasil pemilu oleh KPUD selalu depermasalahakan oleh elit politik lokal sampai elite politik nasional. Elite politik ini dalam berpartisipasi politik dominant pada kegiatan spectator namun sering para elit politik ini berada pada kegiatan politik gladiator.

Tingkat pemahaman elite politik terhadap mekanisme konstitusional system PEMILU sangat rendah, selalu berupaya untuk tidak boleh kalah memperoleh suara dalam PEMILU kepala daerah. Apabila elite politik yang mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah atau pasangan calon presiden mengalami kekalahan maka, konfigurasi politik dari elite politik untuk melakukan penafsiran atau tafsir politik, terhadap proses PEMILU oleh KPU yang curang. Tafsir politik oleh elit politik dominan tidak berlandaskan mekanisme PEMILU yang digunakan. Para elite politik ini memiliki kecenderungan untuk mengabaikan aturan PEMILU semakin tinggi, yang diprioritas oleh para elit politik yakni mencari kekuasaan dan harus memperoleh kekuasaan.

Penulis berpendapat bahwa sistem politik era reformasi para elite politik dan actor politik melebur dalam satu lembaga baru dengan istilah tim sukses dalam system PEMILU di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh warga negara kepada calon pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam pasal 56 – pasal 119 dan didukung secara konstitusional oleh UU No.22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Para elite politik atau tim sukses sangat minim memahami kedua UU ini dalam partisipasi politik. Akibatnya tindakan-tindakan politik para elite politik atau tim sukses selalu berhayal dan berangan dan membangun tafsir politik yang berlandaskan keinginan berpolitik elite politik/tim sukses atau keinginan untuk harus menang pasangan calon yang didukung. Pasangan calon kepala daerah sebagai elit politik tertinggi tingkat lokal sudah bersedia menerima hasil perhitungan suara oleh KPUD, tapi elit politik, aktor politik/tim sukses pendukung pasangan calon kepala daerah, berupaya membangun transfigurasi politik untuk menolak hasil pemilu kepala daerah. Kondisi politik dan fenomena politik seperti ini terjadi disemua daerah di Indonesia yang pernah melakukan PEMILU kepala daerah, walaupun intensitas dan frekuensi protes elite politik, aktor politik yang tergabung dalam tim sukses terhadap perhitungan suara oleh KPUD secara berbeda-beda.

Pada tatanan tertentu para aktor politik sering mengucapkan slogan pada PEMILU kepala daerah yaitu “Tidak ada kawan atau lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan yang abadi”. Transfigurasi politik seperti ini akan merusak cara berpikir warga Negara dan masyarakat Indonesia. Dalam ilmu politik secara teori politik tidak dikenal dengan istilah seperti itu. Para elite politik ,aktor politik yang tergabung dalam tim sukses sering membuat pernyataan politik yang tidak memiliki nuansa akademik dan tidak berlandaskan pada teori politik yang ada dalam system politik. Tim sukses yang hanya memahami fenomena politik secara parsial dan kemudian membuat tafsir politik sesuai kapabilitas yang dimiliki, akibatnya sangat fatal karena dasar pengetahuan politik secara komprehensif sangat rendah. Fenomena tim sukses yang dominan menyimpang dengan tafsir politik parsial, sangat berpengaruh dalam sosialisasi politik dan proses membangun dan mempertahankan system politik demokrasi. Kondisi politik seperti ini menjadi tanggung jawab moral politik oleh ilmuan politik untuk memperbaiki melalui sosialisasi politik, seperti media surat kabar, televisi dan radio. Pada sisi lain ilmuan politik perlu membangun pendidikan politik yang diperuntukan kepada elite politik partai , para calon elite

politik dan tim sukses untuk membenahi dan mengurangi tingkat kesalahan pada saat tafsir politik dan membangun transfigurasi politik.

Kontribusi Ilmuan Sosial Politik Dalam Pemilu Demokratis

Sistem politik demokrasi secara pragmatis membuka ruang bagi ilmuan politik untuk berhadapan dengan pimpinan partai politik yang cenderung oligarkhis yang menguasai partai politik penanggung jawab system politik demokratis. Partai politik secara fungsional memiliki fungsi-fungsi politik yang menentukan bangunan lembaga politik yang demokratis. Secara manajerial partai politik berkewajiban menata elit politik dan aktor politik untuk menjadi pelaku politik. Gabriel Almond secara gamblang mengemukakan fungsi-fungsi politik dalam system politik. Kemudian fungsi system politik ini oleh Almond sebagian dijadikan fungsi partai politik antara lain ?

Parpol sebagai sarana sosialisasi politik dan rekrutmen politik

Parpol sebagai sarana komunikasi politik

Parpol sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Parpol sebagai sarana pembuatan kebijakan

Parpol sebagai sarana konflik (Shilcote, 2003-222)

PEMILU demokrasi membutuhkan partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, sarana komunikasi politik dan sarana recruitment politik. Dari sudut manajemen politik, partai politik di Indonesia memiliki kelemahan pada tingkat manajemen partai politik untuk mengaktualisasikan fungsi-fungsi politik.

Pada era orde baru partai politik sebagai sarana sosialisasi politik tidak mampu diterapkan oleh kaum oligarkhis partai politik. Partai politik diatur secara sentralistik dan berkewajiban memiliki ideology partai seragam dengan ideology organisasi Negara. Yaitu pancasila atau dikenal dengan azas tunggal pancasila. Kondisi ini membuat partai politik (PPP & PDI) tidak berdaya dalam hal sosialisasi politik pada masyarakat pemilih. Sosialisasi politik oleh partai politik harus seiring dengan keinginan penguasa. System sentralistik era orde baru fungsi partai politik harus sesuai keinginan penguasa. Fungsi sosialisasi Partai Politik sebagai sarana untuk menjaga dan mengatur dinamika politik harus sesuai dengan dinamika politik penguasa Orde baru. Ilmuan politik pun terkekang oleh penguasa Orde Baru. Pada era reformasi dengan trend membangun demokrasi, berlangsung sangat cepat. Sosialisasi politik berlangsung tanpa kendali. Partai politik tumbuh menurut kepentingan dan keinginan warga Negara. Sosialisasi parpol dominan pada upaya mencari kekuasaan. Pada tingkat komunikasi politik, para elite partai politik memanfaatkan sistim demokrasi dengan cara membangun tafsir politik yang cenderung mengabaikan konstitusi. Konfigurasi otoritas aktor politik dan elit politik dijadikan alat kekuasaan untuk memaksakan kehendak. Para elit partai politik dan aktor politik mampu bekerja sama untuk merekrut siapa saja atau warga Negara yang berkeinginan kuat untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatife pada tingkat lokal, maupun nasional, partai politik mengajukan syarat utama yaitu kemampuan calon membayar uang pendaftaran untuk dijadikan calon anggota legislatife oleh partai politik. Sedangkan persyaratan lain seperti lama menjadi anggota partai politik yang tidak dijadikan syarat yang permanent. Kemudian syarat lain yang oleh elite partai politik dianggap sebagai sayarat asesori yang tidak dijadikan tolok ukur oleh partai politik dalam menetapkan calon seperti:

- Pernah mengikuti pengkaderan dan sosialisasi anggota parpol
- Pernah menjadi pengurus parpol
- Tingkat pemahaman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga parpol

Persyaratan ini tidak dijadikan sebagai dasar untuk seleksi calon anggota legislatif yang diajukan partai politik. Kondisi dan system manajemen partai politik dalam merekrut anggota legislatif tanpa memiliki persyaratan yang rasional, pemahaman dan kapabilitas sebagai elit partai politik dan aktor politik akan membawa dampak yang cukup serius sebagai calon anggota legislatif terpilih tapi, tidak memahami para political system atau sistem partai politik yang harus dinamik dalam manajemen partai politik, dalam sisitem politik lokal dan sistem politik nasional.

Sebagai ilmuan sosial politik sangat pesimis dengan sejumlah calon anggota legislatif yang direkrut oleh partai politik tanpa syarat pemahaman parpol dalam system politik. Kontribusi ilmuan politik sangat dibatasi oleh otoritas dan oligarkhis pimpinan parpol dalam menjaring calon anggota legislatif pada tingkat lokal dan nasional. Para ilmuan politik yang sudah direkomendasi oleh pimpinan partai politik sebagai penasehat politik PARPOL hanya dijadikan hiasan struktur partai politik. Pada pemilu legislatif 9 april 2009 ilmuan politik tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen politik anggota masyarakat dan anggota partai untuk dijadikan calon anggota legislatif. Secara nasional calon anggota legislatif lokal yang diajukan oleh pimpinan partai politik yang memiliki otoritas, dominant tidak di kunsultasikan dengan penasehat PARPOL atau kuonsultan partai politik, sehingga calon yang diajukan oleh partai politik sangat minim memiliki kapabilitas sebagai calon anggota dewan. Calon anggota dewan seperti ini oleh penulis disebut calon anggota legislatif TOMANURUNG. Calon anggota dewan seperti ini hanya memiliki persyaratan tunggal yaitu membayar uang pendaftaran kepada pimpinan partai politik yang memiliki otoritas dan perilaku oligarkhis dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif.

Komunikasi politik yang dibangun oleh pimpinan parpol era reformasi selalu berlandaskan komunikasi politik oligarkhis. Pimpinan partai dengan otoritas politik memposisikan diri sebagai sumber informasi dalam komunikasi partai politik dengan warga negara pengguna partai politik berlangsung satu arah. Dialogis sulit terbangun, keinginan dan kepentingan pimpinan parpol dijadikan sumber informasi utama yang sulit diabaikan. Anggota masyarakat pengguna secara terpaksa berkewajiban menerima komunikasi politik satu arah. Era reformasi masukan-masukan dari rakyat berupa informasi politik dalam bentuk artikulasi kepentingan masyarakat pengguna partai politik, kebutuhan politik warga Negara untuk menjadi caleg, calon bupati, walikota dan jabatan politik lain perlu diakomodir oleh partai politik secara langsung atau perwakilan partai politik (fraksi) dilegislatif.

System demokrasi yang dibangun di Indonesia era reformasi dominan berlaku pada saat otoritas eksekutif dan otoritas anggota legislatif dalam membahas rancangan PERDA atau rancangan UU, namun kebanyakan terjadi rancangan PERDA dan rancangan UU memiliki isi atau eksistensi jauh dari kepentingan rakyat. Hal seperti ini terjadi karena anggota partai politik yang menempati posisi anggota legislatif sangat kurang dan dapat dikatakan tidak membangun komunkasi politik dengan masyarakat pemilih atau warga Negara untuk memperoleh masukan. Ilmuan politik telah membangun wacana dalam berbagai media bahwa komunikasi politik merupakan faktor yang sangat penting bagi anggota legislatif dalam proses membuat keputusan politik. Anggota legislatif membutuhkan informasi dari masyarakat sebagai bahan materil yang menjadi pertimbangan fraksi-fraksi legislatif / anggota legislatif dalam menetapkan keputusan, sehingga keputusan yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Komunikasi politik masih terus berlangsung setelah keputusan politik ditetapkan. Pada tahap implementasi kebijakan, dibutuhkan komunikasi politik yang intensif antra pemerintah dan masyarakat.

Pencerahan Perpolitikan Sistem Politik

Secara teori politik; lembaga perwakilan politik seperti presiden, gubernur, bupati, walikota termasuk para wakil partai yang didukung oleh warga Negara dalam pemilu harus membangun sistem implementasi kebijakan yang memihak pada masyarakat. Eksekutif sebagai implementator kebijakan berkewajiban melakukan komunikasi politik dengan masyarakat pemilih atas penerapan kebijakan. Kegiatan-kegiatan politik implementasi kebijakan oleh pemerintahan, masyarakat dapat memberi penilaian, atau tanggapan terhadap pelaksanaan kegiatan politik oleh pemerintah, apakah implementasi kebijakan mencapai sasaran dengan baik atau tidak, dan dalam implementasi kebijakan terjadi hal-hal yang menyimpang seperti terjadi penyelewengan otoritas, penyalahgunaan otoritas maka kewajiban masyarakat untuk melakukan kontrol sosial. Informasi dari masyarakat yang terkena kebijakan sangat penting untuk konsumsi pemerintah dalam membangun komunikasi politik yang rasional fungsional. Dalam teori system politik hal seperti ini harus dijadikan umpan-balik (feed back) yang sangat penting terhadap pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam proses pelaksanaan atau implementasi kebijakan.

Teori politik mengharuskan hubungan otoritas pemerintah dan rakyat pemilih kedaulatan harus berlangsung timbal-balik yang seimbang. Teori politik *balance of power* dalam sistem politik menghendaki tingkat keseimbangan yang akurat dan rasional antara legislatif-eksekutif dengan rakyat pemilik kedaulatan untuk menata keseimbangan politik dalam menggunakan kekuasaan, maka legislatif dan eksekutif harus mampu membangun komunikasi politik yang rasional. Komunikasi politik yang rasional ini dimulai pada saat legislatif dan eksekutif melakukan perumusan kebijakan bersama masyarakat dalam wadah MUSREMBANG. Artikulasi kepentingan masyarakat wajib direkrut oleh eksekutif dan legislatif dan ditetapkan sebagai kebijakan. Pada tahap implementasi kebijakan masyarakat menerima berarti komunikasi politik pada saat perumusan kebijakan berlangsung baik. Kondisi ini menggambarkan hubungan otoritas eksekutif dengan legislatif berlangsung terpadu dan kedua lembaga berkeinginan kuat untuk mengurangi dan meminimalkan masalah masyarakat. Pada tatanan ini komunikasi politik berlangsung baik dan bernuansa membangun mekanisme sistem politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi pasti terbangun tatanan sistem pemilihan umum demokrasi. Jika sistem pemilihan umum demokrasi ini tetap dikawal oleh ilmuwan politik bersama elit partai politik maka kemungkinan besar hasil pemilihan umum akan menghasilkan elit politik dan aktor politik yang menjadi anggota dewan dan eksekutif yang bermoral demokrat dan membuat keputusan yang dominan melayani kepentingan rakyat. Makin tinggi keputusan legislatif – eksekutif melayani masyarakat semakin tinggi nilai demokrasi.

Kesimpulan

Sebagai mahasiswa baru yang diterima dalam bidang sosial dan politik harus memfokuskan cara berpikir untuk cerdas dan meraih kemenangan dalam menuntut ilmu sosial dan politik. Kondisi sekarang para sarjana atau ilmuwan sosial politik sangat dibutuhkan seiring dengan dinamika sistem politik. Oleh sebab itu pada saat sekarang sebagai mahasiswa baru sosial politik harus mampu memahami demonstrasi secara akademik dan bertindak sebagai mahasiswa yang cerdas dalam berdemonstrasi. Demonstrasi secara akademik dilarang merusak, membakar, tapi membangun ide sebagai kontribusi pada pemerintah. Pada saat itulah titian embrio ilmuwan sosial politik terbangun dalam diri mahasiswa sebagai calon ilmuwan yang rasional dan objektif.

Selamat berjuang untuk membangun dunia keilmuan yang cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo. Hakekat Politik : Siapa Melakukan Apa, Untuk Memperoleh Apa. Yogyakarta: Akademika. 1985.
- Alfian. Komunikasi Politik Dan Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia. 1991.
- Anderson, Rodees Chirstol. Instrodution To Political Science. Tokyo: Mc Graw-Hil Kogakush. Ltd. 1967.
- Asnawi Sahlan. Kepemimpinan Dan Kepengikutan Dalam Locus Politik Indonesia. Jakarta: Studia Press. 2001.
- Bailusy Kausar. Teori Politik. Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka, Cetakan Ketiga. 2001.
- Brym Robert. Intelektual Dan Politik. Jakarta: Grafiti. 1993.
- Budiardjo, Miriam. Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa. Jakarta: Sinar Harapan. 1986.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia 2008.
- Chilcote Ronald H. Teori Perbandingan Politik. Jakarta: Grafindo. 2003.
- Diantha Imade Pasek. Tiga Tipe POKok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Moderen. Bandung: Abardin. 1990.
- Dragnich Alex N Etl. Politics And Government. New Jersey: Chatam House Publishers, Inc. 1982.
- Dwiyanto Agus. Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM. 2003.
- Ethridge, Marcus E, & Howard Handelman. Politics In A Changing World. New York: St. Martin Press, Inc. 1994.
- Firmansyah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positiniong Ideologi politik Di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Frisch Morthon J. American Political Thought. USA: Pedroc Publishers. 1976.
- Gibbons Michael T. Tafsir Politik: Interpretasi Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer. Yogyakarta: CV.Qalam. 2002.
- Hatta Mohammad. Alam Pemikiran Yunani. Jakarta: Tinta Mas. 1983.
- Heywood, Andrew. Politics. New York: Published By Palgrave. 2002.
- Hidayat Syarif. Too Much Too Sun: Local State Elite's Perspective On And The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy. Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
- Hooser Kenneth R. Unsur-Unsur Pemikiran Ilmiah Dalam Ilmu-Ilmu Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1989.
- Jacobsen, G A & Lipman. Political Science. New York: Barnes And Noble, Inc. 1967.
- Keller Suzanne. Penguasa Dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Moderen. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Lacroix Bernard. Sosiologi Politik Durkheim. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Lipset Seymour Martin. Political Man: Basis Sosial Tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

- Losco Yoseph & Leonardo Williams. Political Theory. Jakarta: Grafindo. 2005.
- Mayer Lawrance C. Comparative Political Inquiry. Illinois: The Dorsey Press. 1972.
- Mitau. State And Local Government: Politics And Processes. IOWA-USA: The New York Times Company. 1964.
- Michels Robert. Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi. Jakarta: Rajawali. 1984.
- Plato. The Republic. New York: Quality Paper Book Club. 1992.
- Popper Karl R. Epistemologi Pemerintahan Masalah. Jakarta: Gramedia. 1991.